

Strategi Penanganan Infrastruktur Permukiman Prioritas di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram

Nia Kurniati*, Ima Rahmawati Sushanti, Sri Rahmi Yunianti, Osy insani

Universitas Muhammadiyah Mataram/Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota,

Jl. K.K. Ahamad Dahlan No, 1 Pagesagan, Mataram, Indonesia

Penulis Korespondensi: niakurniatibima2018@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan perkotaan menunjukkan bahwa akibat dari pertumbuhan kota yang cukup tinggi memberikan dampak terhadap upaya pemenuhan infrastruktur khususnya di kawasan permukiman. Ketersediaan infrastruktur menentukan kualitas permukiman dan kehidupan masyarakat di dalamnya. Persoalan ketersediaan infrastruktur yang masih minim terdapat lokasi prioritas penanganan kawasan permukiman, yaitu kelurahan Bintaro, kecamatan Ampenan. Ketersediaan infrastruktur yang masih minim tersebut adalah jaringan drainase, persampahan dan air bersih. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan konsep dan strategi penanganan infrastruktur permukiman prioritas di kecamatan Ampenan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dengan mendeskripsikan gagasan komprehensif untuk merumuskan konsep penanganan dengan menggunakan analisis Strength, Weakness, Opportunity dan Threat (SWOT) untuk menentukan strategi penanganan infrastruktur permukiman prioritas di kecamatan Ampenan. Hasil dari penelitian adalah konsep penanganan “ infrastruktur terpadu di kelurahan Bintaro” dengan strategi penanganan persampahan, drainase dan air bersih.

Kata kunci : infrastruktur, permukiman, konsep, strategi, penanganan.

PENDAHULUAN

Kota Mataram sebagai salah satu kota yang memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat ditandai dengan tersedianya sarana ekonomi, sarana komunikasi dan transportasi serta sarana pendidikan dan kesehatan yang lengkap sehingga menjadikan kota Mataram sebagai salah satu tujuan migrasi penduduk. Kondisi ini mengakibatkan pertumbuhan kota Mataram menjadi pesat. Hal tersebut juga berkontribusi terhadap terciptanya permukiman padat di perkotaan. Kondisi tersebut berdampak pada upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang terbatas.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, permukiman merupakan. Bagian dari hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Permasalahan perkotaan menunjukkan bahwa akibat dari pertumbuhan kota yang cukup tinggi serta kenyataan akan terbatasnya ruang kota, membawa dampak dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah keterbatasan papan atau permukiman sehingga menimbulkan dampak pada infrastruktur di perkotaan, khususnya terkait perwujudan kualitas permukiman.

Menurut Budiharjo (1991), masalah permukiman merupakan masalah yang kompleks, karena begitu banyaknya faktor-faktor yang saling berkaitan dan tumpang tindih di dalamnya. Permukiman sebagai wadah kehidupan manusia dalam upaya pencapaian infrastruktur yang optimal lebih menekankan pada aspek fisik sebagai pendukung fungsi permukiman.

Kriteria pendukung kelengkapan infrastruktur permukiman merupakan ketersediaan kelengkapan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat antara lain: 1) Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan,, Penyediaan Air Bersih/Minum, Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan Air Limbah, dan Proteksi Kebakaran. Dalam hal ini masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan permukiman. Hal tersebut diantaranya dapat diunjukkan dari perilaku masyarakat untuk memelihara infrastruktur yang ada, selain pemerintah yang bertugas untuk menyelenggarakan ketersediaan infrastruktur tersebut.

Kelurahan Bintaro merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram yang menurut RTRW Kota Mataram kelurahan Bintaro sebagai kawasan strategi social budaya dan pariwisata akan memberi dampak terhadap ketersediaan infrastruktur permukiman untuk mendukung kemajuan lokasi strategis sosial budaya dan pariwisata. Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan terhadap ketersediaan infrastruktur yang ada di Kecamatan Ampenan melalui analisis skoring Kelurahan Bintaro juga terpilih sebagai lokasi prioritas penanganan infrastruktur permukiman di Kecamatan Ampenan. Dalam upaya pemenuhan ketersediaan infrastruktur di kelurahan Bintaro tersebut maka dilakukan perumusan konsep penanganan dengan berdasarkan kebijakan, isu strategis dan temuan penelitian secara komprehensif. Selanjutnya dilakukan penyusunan Strategi Penanganan Infrastruktur Permukiman Prioritas berdasarkan potensi, masalah, peluang dan ancaman yang terdapat di Kelurahan Bintaro khususnya terkait ketersediaan infrastruktur.

METODE PENELITIAN

Lokasi dari penelitian ini berada di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan Kota Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dengan mendeskripsikan gagasan komprehensif untuk merumuskan konsep penanganan dengan menggunakan analisis Strength, Weakness, Opportunity dan Threat (SWOT) untuk menentukan strategi penanganan infrastruktur permukiman prioritas di kelurahan Bintaro, kecamatan Ampenan. Analisis SWOT adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pengembangan. Analisis ini berdasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknees) dan ancaman (thereats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan. Dengan demikian perencana strategis (strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal dalam kondisi yang ada saat ini. Analisis yang dilakukan untuk menentukan upaya pengembangan infrastruktur permukiman. Penentuan Kriteria menggunakan Skala Likert yang merupakan skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dalam proses terdapat banyak alat analisis yang dapat digunakan diantaranya salah satunya teknik analisis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi adalah tenik skala likert. Dalam hal ini skala likert yang digunakan untuk mengetahui kondisi di lapangan dibuat dalam 3 penilaian yaitu :

1. Kondisi buruk = sangat prioritas (<50%)
2. Kondisi sedang = cukup prioritas (50%-70%)
3. Kondisi baik = kurang prioritas (70%-100%)

HASIL

1.1 Lokasi Permukiman Prioritas

Lokasi prioritas merupakan salah satu keluran yang memiliki hasil skoring terendah dari kriteria-kriteria ketersediaan infrastruktur yang telah dilakukan skoring sebelumnya, lokasi prioritas adalah lokasi yang harus ditangani terkait permasalahan infrastruktur dari hasil skoring terendah, dari hasil skoring tersebut di dapatkan hasil infrastruktur terendah yaitu persampahan, drainase dan air bersih dengan skor 1, dalam hal ini akan dirumuskan konsep penangan dan strategi penangan infrastruktur tersebut.

Tabel 1 skoring penentuan lokasi prioritan

No	Kelurahan	Pembobotan Terhadap Aspek-Aspek					Jumlah
		Jalan	Drainase	Persampahan	Air Bersih	Sanitasi	
1	Ampenan Selatan	3	2	2	1	3	14
2	Ampenan Tengah	3	2	2	3	3	15
3	Pejeruk	3	1	2	2	3	12
4	Ampenan Utara	2	2	2	1	3	12
5	Banjar	3	1	2	1	3	13
6	Taman Sari	3	2	2	3	3	15
7	Kebon Sari	3	2	2	2	3	14
8	Pejarakan Karya	3	1	2	1	3	12
9	Bintaro	2	1	1	1	3	11
10	Dayan Pekan	3	2	2	3	3	15
Jumlah		28	16	41	18	30	

Sumber: hasil skoring

Dalam hasil skoring ini jumlah penilaian kelurahan yang paling rendah (sedikit) menjadi lokasi prioritas yang ada di Kecamatan Ampenan, skor terendah yaitu pada kelurahan Bintaro, yang di mana pada kelurahan ini banyak memiliki masalah-masalah yang harus ditangani sesuai hasil skoring terendah yang diberi tanda warna merah.

1.2 Kondisi Infrastruktur Permukiman Prioritas Penanganan

1. kondisi Drainase

Penentuan penilaian (skoring) terhadap saluran drainase ini dilihat dari segi kondisi drainase dengan kriteria baik (drainase berfungsi dengan baik dan konsinya baik), sedang (kondisi buruk tapi masih berfungsi dengan baik atau sebaliknya), buruk (kondisi tidak baik dan fungsinya pun tidak baik).

Tabel 4.3 Skoring Kondisi Drainase di Kecamatan Ampenan

No	Kelurahan	Kondisi Drainase		
		Baik	Sedang	Buruk
1.	Ampenan Selatan	-	2	-
2.	Ampenan Tengah	-	2	-
3.	Pejeruk	-	-	1
4.	Ampenan Utara	-	2	-
5.	Banjar	-	-	1
6.	Taman Sari	-	2	-
7.	Kebon Sari	-	2	-
8.	Pejarakan Karya	-	-	1
9.	Bintaro	-	-	1
10.	Dayan Pekan	-	2	-

Sumber : hasil survey

Keterangan :

Skor 3 : Baik

Skor 2 : Sedang

Skor 1 : Buruk



Gambar 1 dokumentasi kondisi saluran drainase
Sumber: survey tahun 2020

Dari hasil observasi ditemukan bahwa kondisi saluran drainase mengalami penyumbatan yang diakibatkan oleh sampah, sehingga membuat aliran air yang mengalir pada saluran drainase tidak berjalan lancar sehingga fungsi drainase tidak berjalan.

2. Jaringan Persampahan

Penentuan penilaian (skoring) terhadap persampahan ini dilihat dari kriteria baik (tersedia dan difungsikan dengan baik), sedang tersedia tapi tidak difungsikan dengan baik), buruk (tidak tersedia dan tidak difungsikan dengan baik).

Tabel 4.4 Skoring Kondisi Sistem Persampahan di Kecamatan Ampenan

No	Kelurahan	TPA			TPS		Total
		Baik	sedang	buruk	baik	Sedang	
1.	Ampenan Selatan					✓	2
2.	Ampenan Tengah					✓	2
3.	Pejeruk					✓	2
4.	Ampenan Utara					✓	2
5.	Banjar	✓				✓	1
6.	Taman Sari					✓	2
7.	Kebon Sari					✓	2
8.	Pejarakan Karya					✓	2
9.	Bintaro					✓	2
10.	Dayan Pekan					✓	2

Sumber : hasil survey

Keterangan :

Skor 3 : baik

Skor 2 : sedang

Skor 1 : buruk

3. Jaringan Air Bersih

Dalam penentuan skoring ini kami menggunakan standar pengguna PDAM di setiap kelurahan yang di mana kelurahan yang penggunanya berkisar antara 1284-1642 termaksud golongan yang kurang akan pengguna PDAM dan akan diberi skor 1, sedangkan pengguna PDAM antar 1643-2001 tergolong sedang dan diberi skor 2, begitu juga dengan pengguna 2002-2357 akan di beri skor 3 dan tergolong ada (banyak pengguna).

Tabel 4.5 Skoring Ketersediaan PDAM di Kecamatan Ampenan

No	Kelurahan	Penggunaan PDAM (Rumah Tangga)	Ketersediaan PDAM		
			Baik	Sedang	Kurang
1.	Ampenan Selatan	1.829	-	-	1
2.	Ampenan Tengah	2.255	3	-	-
3.	Pejeruk	1.966	-	2	-
4.	Ampenan Utara	1.420	-	-	1
5.	Banjar	1.454	-	-	1
6.	Taman Sari	2.357	3	-	-
7.	Kebon Sari	2.015	-	2	-
8.	Pejarakan Karya	1.284	-	-	1
9.	Bintaro	1.593	-	-	1
10.	Dayan Pekan	2.008	3	-	-

Sumber : hasil survey

Keterangan :

Skor 3 : Baik

Skor 2 : Sedang

Skor 1 : Kurang

PEMBAHASAN

1. Konsep Penanganan

Konsep Penanganan merupakan gagasan komprehensif dari beberapa aspek yang mendukung terselenggaranya infrastruktur yang memadai. Gagasan tersebut diperoleh dari dasar kebijakan, isu strategis dan temuan penelitian yang selanjutnya dirumuskan menjadi konsep penanganan infrastruktur permukiman prioritas.

Dasar kebijakan yang mendukung terselenggaranya infrastruktur permukiman di kelurahan Bintaro, kecamatan Ampenan adalah : 1) RTRW Kota Mataram yang menjadikan kelurahan Bintaro sebagai kawasan strategi social budaya dan pariwisata 2) Visi Misi Kecamatan Ampenan, visi yaitu “Terwujudnya masyarakat Ampenan yang maju, Religius dan Berbudaya” dan salah satu misi meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kecamatan Ampenan.

Isu Strategis merupakan harapan dari stakeholders terkait penyelenggaraan infrastruktur permukiman. Dalam hal ini stakeholders yang dilibatkan adalah aparat pemerintah dan masyarakat. Camat Ampenan Zarkasy mengatakan, hujan deras yang menguyur kota mataram membuat beberapa lingkungan tergenang, dan salah satu pemicunya adalah saluran yang tersumbat sampah “itu pemicu utama, karena sampah masih banyak ditemukan di saluran.” Daerah yang rawan yakni daerah yang berdekatan dengan sungai. Perilaku buang sampah di saluran perlu diubah. Masyarakat diminta untuk tidak membuang sampah ke saluran maupun ke sungai. Dalam hal ini juga masyarakat berharap untuk peningkatan sarana serta infrastruktur permukiman untuk membantu aktivitas masyarakat.

Dari beberapa hal gagasan tersebut dapat dirumuskan konsep penanganan yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

No	Dasar Kebijakan	Isu Strategis	Temuan Penelitian	Konsep Penanganan
1	RTRW Kota Mataram:	Aparat Pemerintah	Jaringan Drainase	infrastruktur terpadu di kelurahan Bintaro.
2.	Visi Misi Kota Mataram/Ampenan/Bintaro	Masyarakat	Jaringfan Persampahan	
			Jaringan Air Bersih	

Jadi konsep penanganan infrastruktur permukiman prioritas di kelurahan Bintaro, kecamatan Ampenan kota Mataram adalah “ infrastruktur terpadu di kelurahan Bintaro”

2. Strategi Penanganan

Strategi penanganan infrastruktur permukiman prioritas ditentukan berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari ketersediaan infrastruktur yang selaras dengan konsep penanganan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2. berikut :

Eksternal/Internal	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
	- Merupakan kampung nelayan di kecamatan Ampenan. - Memiliki sarana prasarana pendukung yang cukup memadai - Kelurahan Bintaro merupakan kawasan resapan air.	- Kurang mengoptimalkan infrastruktur yang ada - Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penataan lingkungan hidup - Kurangnya pengunan PDAM - Memiliki saluran drainase yang buruk. - Belum meratanyan tingkat kompetensi SDM

Peluang (Opportunity) 1. Kelurahan Bintaro merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan social budaya. 2. Kelurahan Bintaro merupakan kawasan strategis dibidang pariwisata. 3. Dalam RTRW kota Mataram kelurahan Bintaro di Rencana pengembangan bahan bakar minyak dengan memelihara depo bahan bakar minyak dan gas serta pengelolaan migas.	S-O 1. Memajukan kelurahan Bintaro melalui kelengkapan infrastruktur untuk mendukung kawasan strategis dibidang sosial budaya dan pariwisata. 2. Meningkatkan infrastruktur persampahan, drainase dan air bersih untuk mendukung rencana depo bahan bakar minyak dan gas serta pengelolaan migas sebagai alur pendukung	W-O 1. Meningkatkan infrastruktur sesuai kegunaan. 2. Peningkatan SDM untuk mendukung kawasan strategis social budaya dan pariwisata. 3. Meningkatkan penyediaan air bersih.
Ancaman (Threat) 1. Masyarakat yang semakin kritis dan peka akan perubahan 2. Semakin heterogennya masyarakat dan arus urbanisasi yang padat	S-T 1. Memanfaatkan pola pikir kritis masyarakat untuk mendukung peningkatan infrastruktur. 2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan penduduk agar mampu melayani.	W-T 1. Pemerataan peningkatan SDM untuk peningkatan kawasan permukiman yang ramah lingkungan. 2. Mengoptimalkan peranan masyarakat dalam mengelola infrastruktur yang telah tersedia (air bersih dan drainase)

Jadi strategi penanganan infrastruktur permukiman prioritas yang sesuai dengan konsep penanganan di kelurahan Bintaro, kecamatan Ampenan kota Mataram adalah :

1. Memajukan kelurahan Bintaro melalui kelengkapan infrastruktur untuk mendukung kawasan strategis dibidang sosial budaya dan pariwisata. Dengan rencana penanganan infrastruktur yang tergolong buruk dari hasil skoring yaitu terkait persampahan, drainase dan air bersih.
2. Meningkatkan infrastruktur persampahan, drainase dan air bersih untuk mendukung rencana depo bahan bakar minyak dan gas serta pengelolaan migas sebagai alur pendukung
 - a. Persampahan dengan rencana
 - Pengurangan sampah dari sumbernya dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 3R, menerapkan intensif dan disinsentif dalam 3R.
 - Peningkatan peran aktif masyarakat dengan cara peningkatan pemahaman pengelolaan sampah sejak dini, menyebarluaskan pemahaman pengelolaan sampah pada masyarakat, meningkatkan pembinaan masyarakat (khususnya kaum perempuan), mendorong pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

- Peningkatana cakupan layanan dan kualitas pengelolaan, dengan cara meningkatkan pemanfaatan dan kapasitas sarpras persampahan, meningkatkan kualitas pengelolaan TPA menuju *sanitary landfil*, mengembangkan pengelolaan TPA regional, menerapkan teknologi tepat guna dan berwawasan lingkungan
 - b. Drainase dengan rencana
 - Keterpaduan penanganan genangan dengan cara mendorong rencana induk sistem drainase terpadu (drainase lingkungan, utama dan pengelolaan sungai), mengembangkan sistem drainase berwawasan lingkungan yang mendukung kontervasi air, meningkatkan koordinasi antar instansi.
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan dengan cara, mendorong pembentukan institusi pengelola drainase, meningkatkan kinerja dan kapasitas institusi pengelola, peningkatan kapasitas SDM.
 - c. Air bersih dengan rencana
Penyediaan PDAM di seluruh rumah masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih.
3. Memanfaatkan pola pikir kritis masyarakat untuk mendukung peningkatan infrastruktur dengan rencana sosialisasi penerapan ramah lingkungan dan peningkatan SDM untuk mendukung kawasan strategis social budaya dan pariwisata dan pemerataan peningkatan SDM untuk peningkatan kawasan permukiman yang ramah lingkungan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap ketersediaan infrastruktur yang ada di Kecamatan Ampenan melalui analisis skoring Kelurahan Bintaro juga terpilih sebagai lokasi prioritas penanganan infrastruktur permukiman di Kecamatan Ampenan. dari hasil skoring tersebut di dapatkan hasil infrastruktur terendah yaitu persampahan, drainase dan air bersih dengan skor 1, sehingga dirumuskan konsep penangan yaitu “infrastruktur terpadu di kelurahan Bintaro” dengan strategi penangan infrastruktur yaitu:

1. Memajukan kelurahan Bintaro melalui kelengkapan infrastruktur untuk mendukung kawasan strategis dibidang sosial budaya dan pariwisata.
2. Meningkatkan infrastruktur persampahan, drainase dan air bersih untuk mendukung rencana depo bahan bakar minyak dan gas serta pengelolaan migas sebagai alur pendukung
3. Memanfaatkan pola pikir kritis masyarakat untuk mendukung peningkatan infrastruktur dengan rencana sosialisasi penerapan ramah lingkungan dan peningkatan SDM untuk mendukung kawasan strategis social budaya dan pariwisata dan pemerataan peningkatan SDM untuk peningkatan kawasan permukiman yang ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Budihardjo, Eko. 2006. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Bandung: penerbit Alumni
Handayani, S., 2008. *Partisipasi masyarakat kampung kota untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman (studi kasus: permukiman kampung kota bandung)*. Tesis, program pasca saejana institut pertanian Bogor.
Kecamatan Ampenan dalam angka tahun 2019
Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013
Profil kecamatan tahun 2019
RTRW Kota Mataram
undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang *pengelolaan sampah*
undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang *perumahan permukiman*